BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang menyebutkan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang berlaku di suatu daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 287);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Standar biaya adalah satuan biaya sebanyak-banyaknya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya dan menjadi pedoman penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2013.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Belanja Sewa Rumah Jabatan dan Biaya Premium yang Dibiayai Dengan Dana APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 Februari 2013 M
10 Rabiul Akhir 1434 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 21 Februari 2013 M
10 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2013 NOMOR . . .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2013 M
10 RABIUL AKHIR 1434 H

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2013

1 STANDAR BIAYA UANG MAKAN DAN MINUM, BUPATI, WAKIL BUPATI, PNS DAN NON PNS

No	Uraian	Satuan	Uang Makan (Rp)	Uang Minum (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bupati	OH	25,000	10,000
2.	Wakil Bupati	OH	25,000	10,000
3.	PNS dan Non PNS	OH	10,000	3,500

Catatan :

1. Uang makan dan minum diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Non PNS berdasarkan jumlah hari masuk kerja, kecuali Guru dan para Medis.
2. Besaran satuan biaya uang makan dan minum sudah termasuk pajak.

2. STANDAR BIAYA HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU DAN BENDAHARA BARANG PADA SKPK

No	Anggaran	Honor Per- Bulan (OB)		
		Bendahara Pembantu (Rp)	Bendahara Barang (Rp)	Bendahara Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	≤ 50 juta	125,000	100,000	175,000
2.	51 s/d 200 Juta	150,000	125,000	200,000
3.	201 s/d 500 Juta	200,000	150,000	250,000
4.	501 s/d 1 Milyar	250,000	200,000	300,000
5.	>1 Milyar	350,000	300,000	500,000

3. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA UMUM DINAS PPKAD

No	Uraian	Satuan	Honor (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pembantu Bendaharawan Umum (BUD)	OB	750,000

4. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Honor (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	600,000
2.	Sekretaris	OB	500,000
3.	Anggota	OB	350,000

5. STANDAR . . .

5. STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA HONORER SKPK

No	Uraian	Satuan	Honor (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tenaga Honorer/THL	OB	500,000
2	Tenaga Honorer/THL Merangkap Operator Komputer	OB	650,000
3.	Tenaga Satpol Pamong Praja	OB	1,200,000
4.	Tenaga Pemadam	OB	1,000,000
5.	Tenaga Satpam	OB	1,000,000
6.	Tenaga Kebersihan	OB	1,000,000
7.	Tenaga Kebersihan Tali Air/Got/saluran	OB	1,000,000

6. STANDAR BIAYA BAHAN BAKAR (PREMIUM) PER BULAN

No	Jabatan	Jumlah Liter/Bulan
1	2	3
1.	Bupati	660
2.	Wakil Bupati	600
3.	Ketua DPRK	600
4.	Wakil Ketua DPRK	450
5.	Sekretaris Daerah	440
6.	Asisten	330
7.	Staf Ahli	154
8.	Kepala Dinas/Badan	220
9.	Kepala Kantor	176
10.	Kabag. Setdakab/kabag. Setwan	132
11.	Camat	220

7. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No	Jenis Kendaraan	Biaya Pemeliharaan – Per Tahun (Rp)				
		Tahun Pembuatan				
		< 2005	2005 - 2007	2008 - 2010	2011 - 2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Herrier	-	-	-	20,000,000	15,000,000
2.	Fortuner	-	-	20,000,000	19,000,000	12,000,000
3.	CR-V	-	-	15,000,000	12,000,000	10,000,000
4.	Dabel Kabin	15,000,000	13,000,000	12,000,000	10,000,000	6,000,000
5.	Inova	15,000,000	13,000,000	12,000,000	10,000,000	6,000,000
6.	Avanza	12,000,000	10,000,000	8,000,000	6,000,000	4,000,000
7.	Kijang	13,000,000	10,000,000	-	-	-
8.	Pic Up	10,000,000	8,000,000	6,000,000	4,500,000	3,000,000

Catatan :

1. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang.
2. Satuan biaya untuk Pic Up semua jenis Merk.
3. Satuan biaya yang belum ada di sesuaikan dengan harga satuan kendaraan yang berlaku.

8. STANDAR . . .

8. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS

No	Jenis Kendaraan	Biaya Pemeliharaan – Per Tahun (Rp)				
		Tahun Pembuatan				
		< 2005	2005 - 2007	2008 - 2010	2011 - 2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bus sekolah	14,000,000	12,000,000	10,000,000	9,000,000	7,000,000
2.	Mobil Kebersihan	18,000,000	14,000,000	12,000,000	10,000,000	8,000,000
3.	Mobil Pemadam	22,000,000	21,000,000	20,000,000	15,000,000	13,000,000
4.	Mobil Tangki Air	14,000,000	12,000,000	10,000,000	9,000,000	7,000,000
5.	Mobil Ambulance	12,000,000	10,000,000	9,000,000	8,000,000	6,000,000
6.	Damp Truk	14,000,000	12,000,000	10,000,000	9,000,000	7,000,000

Catatan :

1. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang.
2. Satuan biaya termasuk roda 4 (empat) dan roda 6 (enam).
3. Semua jenis merk kendaraan termasuk mobil ambulance.
4. Khusus mobil kebersihan satuan biaya sudah termasuk pemeliharaan kontainer/bak sampah.

9. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEJABAT/PANITIA ULP DAN POKJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH

No	Anggaran (Rp)	Satuan	Honor (Rp)
1	2	3	4
1.	≤ 50 juta	OB	350,000
2.	51 Juta s/d 200 Juta	OB	620,000
3.	201 Juta s/d 500 Juta	OB	750,000
4.	501 Juta s/d 1 Milyar	OB	1,000,000
5.	>1 Milyar	OB	2,000,000

Catatan :

1. Satuan biaya untuk Jasa Kontruksi, Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pengesahan APBK murni s/d APBK-Perubahan dihitung OB = Orang Bulan selama 6 (bulan).

   a. Ketua Rp. 2.000.000,-

   b. Sekretaris Rp. 1.500.000,-

   c. Anggota Rp. 1.200.000,-

2. Satuan biaya untuk Jasa Kontruksi, Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi untuk Pejabat Pengadaan dari beberapa paket kegiatan Penunjukan Langsung (PL) yang dikelola yang jumlah biaya dari beberapa paket s/d Rp. 200.000.000,- dengan standar biaya honor Rp. 350.000, sedangkan dari beberapa paket kegiatan Penunjukan Langsung (PL) yang jumlah biaya keseluruhannya diatas Rp. 200.000.000,- satuan biaya honor Rp. 650.000,- bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pengesahan APBK murni s/d APBK Perubahan dihitung OB = Orang Bulan selama 6 (bulan).

3. Jumlah Panitia Barang dan Jasa gasal (3, 5, 7 dan 9) orang

4. Jumlah Pejabat Pengadaan 1 (satu) orang.

10. STANDAR . . .

10. STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERATOR KOMPUTER PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN POKJA BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Uraian	Satuan	Honor (Rp)
1	2	3	4
1	PNS/NON PNS	OB	750,000

Catatan :

1. Satuan biaya diberikan untuk operator komputer pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja Barang/Jasa Pemerintah
2. Satuan biaya dihitung OB = Orang Bulan selama 6 (bulan), walaupun pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pengesahan APBK murni s/d APBK-Perubahan tahun berjalan.

11. STANDAR BIAYA HONORARIUM PPK-SKPK DAN PPTK PADA SKPK

No	Anggaran	Honor Kegiatan (OK)	
		PPK-SKPK (Rp)	PPTK (Rp)
1	2	3	4
1.	≤ 50 juta	250,000	300,000
2.	51 s/d 200 Juta	300,000	350,000
3.	201 s/d 500 Juta	350,000	450,000
4.	501 s/d 1 Milyar	450,000	500,000
5.	>1 Milyar	500,000	650,000

Catatan :

1. Satuan biaya diberikan untuk PPK-SKPK dan PPTK adalah pada 1(satu) kegiatan untuk sejumlah kegiatan yang ada pada SKPK, dan PPTK yang menduduki jabatan Eselon IV.

12. STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PERMETER PERSEGI (PER-M2)

No	Harga Gedung Bertingkat Permeter Persegi (Rp/m2)		Harga Gedung Tidak Bertingkat Permeter Persegi (Rp/m2)	
	Kelas Sederhana	Kelas Tidak Sederhana	Kelas Sederhana	Kelas Tidak Sederhana
1	2	3	4	5
1.	3,372,000	5,099,000	3,062,000	4,288,000

Catatan :

1. Ketentuan harga merupakan standar harga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil yang telah disesuaikan dengan harga maksimum di Kabupaten Pidie Jaya.

13. STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH NEGARA PERSEGI (PER-M2)

No	Harga Rumah Negara Permeter Persegi (Rp/M2)		
	Type A	Type B	Type C
1	2	3	4
1.	3,077,000	2,983,000	2,825,000

Catatan :

1. Ketentuan harga merupakan standar harga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil yang telah disesuaikan dengan harga maksimum di Kabupaten Pidie Jaya.

14. STANDAR . . .

14. STANDAR HARGA SATUAN PAGAR GEDUNG DAN RUMAH NEGARA PERMETER (PER-M')

No	Uraian	Harga Pagar Permeter Panjang (Rp/M²)				
		Gedung		Rumah Negara		
		Klas Sederhana	Klas Tidak sederhana	Type A	Type B	Type C
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pagar Depan	1,043,000	2,450,000	1,132,000	1,121,000	1,030,000
2.	Pagar Belakang/Samping	1,487,000	1,634,000	1,293,000	1,293,000	1,107,000

Catatan :

1. Ketentuan harga merupakan standar harga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil yang telah disesuaikan dengan harga paling tinggi di Kabupaten Pidie Jaya.

15. STANDAR BIAYA PERENCANAAN (JASA KONSULTANSI)

No	Nilai Fisik (Rp)	Gedung	Jalan dan Jembatan	Saluran/ Drainase D.I/Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
1	2	3	4	5	6	7
1.	≤ 500 Juta	4%	4%	4%	4%	4%
2.	501 Juta s/d 1 Milyar	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
3.	>1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%

Catatan :

1. Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku.
2. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Kimpraswil.
3. Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

16. STANDAR BIAYA PENGAWASAN (SUPERVISI) JASA KONSULTANSI

No	Nilai Fisik (Rp)	Gedung	Jalan dan Jembatan	Saluran/ Drainase D.I/Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
1	2	3	4	5	6	7
1.	≤ 1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%
2	>1 Milyar	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Catatan :

1. Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku.
2. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Kimpraswil.
3. Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

17. STANDAR . . .

17. STANDAR BIAYA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BEBAN KERJA (TPPBK)

No	Jabatan	Satuan	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	OB	25,000,000
2.	Wakil Bupati	OB	22,500,000
3.	Sekretaris Daerah	OB	10,000,000
4.	Asisten	OB	9,000,000
5.	Staf Ahli	OB	3,500,000
6.	Kepala Dinas/Badan/Inspektur	OB	4,000,000
7.	Ka. Bappeda	OB	5,500,000
8.	Kadis PPKAD	OB	6,000,000
9.	Sekretaris Dewan	OB	5,000,000
10.	Ka. Kantor	OB	2,250,000
11.	Kabag	OB	1,750,000
12.	Camat	OB	2,250,000
13.	Kabid. Anggaran DPPKAD	OB	3,000,000
14.	Sekretaris Dan Kabid. DPPKAD	OB	2,000,000
15.	Sekretaris dan Kabid. Bappeda	OB	1,500,000
16.	Kabag. Setwan	OB	1,750,000
17.	Sekcam	OB	1,250,000
18.	Sekretaris, Kabid Pada Dinas Dan Badan Lain	OB	1,250,000
19.	Kasi Anggaran DPPKAD	OB	600,000
20.	Pejabat Eselon IV-A	OB	400,000
21	Pejabat Eselon IV-B	OB	300,000
22	Tenaga Guru	OB	150,000
23	Tenaga Medis	OB	150,000
24	Dokter Spesialis	OB	7,500,000
25	Kepala RSUD Meureudu	OB	2,750,000
26	Kepala Puskesmas	OB	2,000,000
27	Dokter Umum, Dokter PTT	OB	2,000,000
28	Staf SKPK	OB	100,000
29	Pembantu Kuasa BUD	OB	750,000
30	Bendahara Pengeluaran Setdakab.	OB	600,000
31	Bendahara Pengeluaran DPPKAD	OB	400,000
32	Bendahara Penerima DPPKAD	OB	300,000
33	Bendahara Pengeluaran Pembantu DPPKAD	OB	400,000

18. STANDAR . . .

18. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Jenis Kegiatan /Komponen	Biaya (Rp)
1	2	3
I.	**Luar Daerah Provinsi Aceh (Jakarta)**	
	A. Pejabat Negara	**1,450,000**
	1. Penginapan	1,000,000
	2. Uang Harian	450,000
	B. Pejabat Eselon II	**1,350,000**
	1. Penginapan	900,000
	2. Uang Harian	450,000
	C. (Gol IV, III) dan/atau Eselon III	**1,100,000**
	1. Penginapan	650,000
	2. Uang Harian	450,000
	D. (Gol III) dan/atau Eselon IV	**950,000**
	1. Penginapan	500,000
	2. Uang Harian	450,000
	E. PNS Gol. II dan Gol. I	**850,000**
	1. Penginapan	400,000
	2. Uang Harian	450,000
II.	**Luar Daerah Dalam Provinsi Aceh**	
	A. Pejabat Negara	**1,100,000**
	1. Penginapan	800,000
	2. Uang Harian	300,000
	B. Pejabat Eselon II	**1,000,000**
	1. Penginapan	700,000
	2. Uang Harian	300,000
	C. (Gol IV, III)dan/atau Eselon III	**800,000**
	1. Penginapan	500,000
	2. Uang Harian	300,000
	D. (Gol III) dan/atau Eselon IV	**600,000**
	1. Penginapan	300,000
	2. Uang Harian	300,000
	E. PNS Gol. II dan Gol. I	**500,000**
	1. Penginapan	200,000
	2. Uang Harian	300,000
III.	**Khusus ke Kabupaten Pidie**	**400,000**
	1. Uang Harian	300,000
	2. Trasportasi Pegawai	100,000
IV.	**Dalam Daerah Kabupaten Pidie Jaya**	
	A. (Gol. IV) dan/atau Eselon II	**220,000**
	1. Angkatan Setempat dan Uang Saku	160,000
	2. Uang Makan	60,000
	B. (Gol. IV, III) dan/atau Eselon III	**200,000**
	1. Angkatan Setempat dan Uang Saku	145,000
	2. Uang Makan	55,000
	C. Gol. II	**175,000**
	1. Angkatan Setempat dan Uang Saku	130,000
	2. Uang Makan	45,000

'D. Gol I . .

	D. Gol I	**145,000**
	1. Angkatan Setempat dan Uang Saku	105,000
	2. Uang Makan	40,000
V.	**Bantuan Biaya Perjalanan Dinas**	
	1. Bantuan petugas keamanan tertutup (paket)	650,000
	2. Bantuan perjalanan dinas untuk sopir	300,000

Catatan :

1. Uang harian adalah :
   a. Uang saku;
   b. Uang makan dan
   c. Uang transpor lokal dihitung dari kota asal ke tempat tujuan P.P.
2. Satuan biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yakni:
   a. Tingkat B untuk Pejabat Negara;
   b. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRK;
   c. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
   d. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III dan
   e. Tingkat F untuk Pegawai Negeri Sipil Gol.II dan Gol I.
3. **Pejabat negara adalah :**
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati; dan
   c. Pimpinan DPRK.

19. FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Jenis Kendaraan		
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api
1	2	3	4	5	6
1.	Pejabat Negara	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
2.	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
3.	Eselon III/Gol. IV	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
4.	Eselon IV/ Gol. III	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
5.	PNS Gol . II dan Gol. I	F	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

20. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon III/Gol. IV	D	Bintang Tiga	Standar
4.	Eselon IV/ Gol. III	E	Bintang Dua	Standar
5.	PNS Gol . II dan Gol. I	F	Bintang Satu	Standar

21. STANDAR . . .

21 STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SELAIN DALAM DAERAH PROVINSI ACEH DAN DKI JAKARTA

No	Provinsi	Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Sumatera Utara	300,000
2.	Riau	300,000
3.	Kepulauan Riau	300,000
4.	Jambi	300,000
5.	Sumatera Barat	300,000
6.	Sumatera Selatan	300,000
7.	Lampung	300,000
8.	Bengkulu	300,000
9.	Bangka Belitung	300,000
10.	Banten	300,000
11.	Jawa Barat	350,000
12.	Jawa Tengah	300,000
13.	D.I. Yogjakarta	350,000
14.	Jawa Timur	350,000
15.	Bali	400,000
16.	Nusa Tenggara Barat	350,000
17.	Nusa Tenggara Timur	350,000
18.	Kalimantan Barat	300,000
19.	Kalimantan Tengah	300,000
20.	Kalimantan Selatan	300,000
21.	Kalimantan Timur	350,000
22.	Sulawesi Utara	300,000
23.	Gorontalo	300,000
24.	Sulawesi Barat	300,000
25.	Sulawesi Selatan	350,000
26.	Sulawesi Tengah	300,000
27.	Sulawesi Tenggara	300,000
28.	Maluku	300,000
29.	Maluku Utara	300,000
30.	Papua	450,000
31.	Irian Jaya Barat	400,000

Catatan :

1. Satuan biaya tiket Bus Umum dan kendaraan lainnya disesuaikan dengan harga yang berlaku.

22. SATUAN . . .

22. SATUAN BIAYA PESAWAT PERGI PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Kota		Biaya Tiket Ekonomi
	Asal	Tujuan	(Rp)
1	2	3	4
1.	Banda Aceh	Medan	2,190,000
2.	Banda Aceh	Jakarta	4,400,000
3.	Jakarta	Ambon	7,000,000
4.	Jakarta	Balik Papan	3,790,000
5.	Jakarta	Bandar Lampung	1,580,000
6.	Jakarta	Banjar Masin	2,990,000
7.	Jakarta	Batam	2,880,000
8.	Jakarta	Bengkulu	2,600,000
9.	Jakarta	Biak	7,500,000
10.	Jakarta	Denpasar	3,260,000
11.	Jakarta	Gorontalo	4,800,000
12.	Jakarta	Jambi	2,450,000
13.	Jakarta	Jaya Pura	8,900,000
14.	Jakarta	Jokjakarta	2,260,000
15.	Jakarta	Kendari	4,180,000
16.	Jakarta	Kupang	5,080,000
17.	Jakarta	Makasar	3,820,000
18.	Jakarta	Malang	2,690,000
19.	Jakarta	Mamuju	4,860,000
20.	Jakarta	Manado	5,100,000
21.	Jakarta	Manokwari	10,820,000
22.	Jakarta	Mataram	3,220,000
23.	Jakarta	Padang	2,950,000
24.	Jakarta	Palangkaraya	2,980,000
25.	Jakarta	Palembang	2,260,000
26.	Jakarta	Palu	5,100,000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	2,120,000
28.	Jakarta	Pekan Baru	3,010,000
29.	Jakarta	Pontianak	2,780,000
30.	Jakarta	Semarang	2,180,000
31.	Jakarta	Solo	2,340,000
32.	Jakarta	Surabaya	2,670,000
33.	Jakarta	Ternate	6,660,000
34.	Jakarta	Timika	7,480,000

Catatan :

1. Tiket Pesawat Udara dari Kota Asal ke Tempat Tujuan P.P. dibayar sesuai harga yang berlaku (at cost) + Airpotec.

23. STANDAR . . .

23. STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, SELAIN DALAM DAERAH PROVINSI ACEH DAN DKI JAKARTA

No	Provinsi	Tarif Hotel Kelas Suite	Tarif Rata-Rata Hotel Standar/Deluxe/Non				
			Bintang Lima (Rp)	Bintang Empat (Rp)	Bintang Tiga (Rp)	Bintang Dua (Rp)	Bintang Satu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sumatera Utara	4,500,000	1,250,000	1,000,000	550,000	400,000	290,000
2	Riau	3,450,000	1,650,000	960,000	670,000	400,000	340,000
3	Kepulauan Riau	3,410,000	1,500,000	740,000	550,000	380,000	250,000
4	Jambi	4,000,000	1,010,000	1,000,000	560,000	370,000	230,000
5	Sumatera Barat	4,240,000	1,750	1,030,000	600,000	370,000	280,000
6	Sumatera Selatan	4,500,000	1,350,000	1,000,000	500,000	400,000	280,000
7	Lampung	3,300,000	1,700,000	800,000	600,000	340,000	260,000
8	Bengkulu	1,300,000	920,000	790,000	580,000	490,000	400,000
9	Bangka Belitung	2,000,000	1,100,000	820,000	500,000	340,000	300,000
10	Banten	3,250,000	1,630,000	1,200,000	700,000	450,000	290,000
11	Jawa Barat -	3,250,000	1,650,000	1,200,000	830,000	440,000	330,000
12	Jawa Tengah	4,050,000	1,650,000	1,100,000	750,000	450,000	280,000
13	D.I. Yogjakarta	3,750,000	1,250,000	1,000,000	550,000	480,000	280,000
14	Jawa Timur	3,790,000	1,560,000	960,000	600,000	390,000	280,000
15	Bali	4,510,000	2,280,000	1,450,000	1,100,000	800,000	500,000
16	Nusa Tenggara Barat	2,400,000	1,200,000	1,000,000	550,000	450,000	300,000
17	Nusa Tenggara Timur	3,000,000	1,160,000	1,000,000	550,000	470,000	400,000
18	Kalimantan Barat	2,400,000	1,400,000	830,000	740,000	430,000	300,000
19	Kalimantan Tengah	3,000,000	1,300,000	1,000,000	750,000	400,000	290,000
20	Kalimantan Selatan	4,250,000	1,400,000	1,200,000	700,000	500,000	350,000
21	Kalimantan Timur	4,000,000	1,500,000	1,230,000	750,000	550,000	450,000
22	Sulawesi Utara	3,200,000	1,380,000	1,240,000	600,000	500,000	290,000
23	Gorontalo	1,320,000	1,030,000	820,000	660,000	410,000	240,000
24	Sulawesi Barat	1,050,000	850,000	670,000	540,000	400,000	360,000
25	Sulawesi Selatan	4,000,000	1,400,000	900,000	800,000	420,000	330,000
26	Sulawesi Tengah	2,030,000	1,210,000	1,010,000	510,000	400,000	330,000
27	Sulawesi Tenggara	1,850,000	1,200,000	900,000	600,000	450,000	350,000
28	Maluku	3,000,000	1,200,000	1,020,000	600,000	390,000	280,000
29	Maluku Utara	3,110,000	1,400,000	1,300,000	600,000	360,000	330,000
30	Papua	2,850,000	1,600,000	1,050,000	610,000	460,000	380,000
31	Irian Jaya Barat	4,500,000	1,580,000	1,050,000	900,000	400,000	370,000

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2013 M
10 RABIUL AKHIR 1434 H

1. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN DAN SERVIS PEMELIHARAAN AC SENTRAL, AC SPLIT DAN AC WINDOW

No	Uraian	Merk/Model/Ukuran	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Service	AC split	Unit	200,000
2.	Service	Ac Sentral	Unit	610,000
3.	Service	Cool Tower	Unit	560,000
4.	Service	AC Split Multi	Unit	100,000
5.	Isi, Tambah dan Ganti Freon		Per Kg	250,000
6.	Ganti Kompressor AC Window	2 PK	Buah	2,100,000
7.	Ganti Kompressor AC Window	1 1/2 PK	Buah	1,680,000
8.	Ganti Kompressor AC Window	1 PK	Buah	1,400,000
9.	Ganti Kompressor AC Window	5 PK	Buah	3,500,000
10.	Ganti Kompressor AC Split	4 PK	Buah	3,350,000
11.	Ganti Kompressor AC Split	3 PK	Buah	3,600,000
12.	Ganti Kompressor AC Split	2 PK	Buah	2,200,000
13.	Ganti Kompressor AC Split	1 1/2 PK	Buah	1,800,000
14.	Ganti Kompressor AC Split	1 PK	Buah	1,200,000
15.	Ganti PCB Indoor		Buah	400,000
16.	Dinamo/Motor Ven		Buah	400,000
17.	Sensor	1 PK	Buah	150,000
18.	Sensor	2 PK	Buah	150,000
19.	Motor Air Swing		Buah	80,000
20.	Pipa AC/Tubing	1 PK	Buah	60,000
21.	Pipa AC/Tubing	2PK	Buah	75,000
22.	Neppel	1 PK	Buah	25,000
23.	Neppel	2 PK	Buah	50,000
24.	Remote AC Multiguna		Buah	70,000
25.	Evafurator Indoor		Buah	300,000
26.	Overlux		Buah	50,000
27.	Kapasitor	1 PK	Buah	125,000
28.	Kapasitor	2 PK	Buah	180,000
29.	Blower Kipas Indoor		Buah	400,000
30.	Motor Ven Outdoor	1 PK	Buah	400,000
31.	Motor Ven Outdoor	2 PK	Buah	650,000

Catatan :

1. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.
2. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak tersebut dalam tabel diatas di sesuaikan dengan harga yang berlaku.

2. PEMELIHARAAN . . .

2. PEMELIHARAAN MESIN TULIS

No	Uraian	Merk/Model/ Ukuran	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Service dan Perbaikan Mesin Ketik, tidak termasuk Spare Part	Manual	Unit	170,000
2	Service dan Perbaikan Mesin Ketik, tidak termasuk Spare Part	Ketrik	Unit	185,000

Catatan :

1. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.
2. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak tersebut dalam tabel di atas disesuaikan dengan harga yang berlaku.

3. PEMELIHARAAN MESIN FOTOCOPY

No	Uraian	Merk/Model/ Ukuran	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Service dan perbaikan, mesin foto copy per Call (1 kali panggilan / service, luar Spare Part)		Unit	200,000

Catatan :

1. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.
2. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak terse but dalam tabel di atas disesuaikan dengan harga yang berlaku.

4. PEMELIHARAAN TELEPON, KOMPUTER, FILLING KABINET/LEMARI BESI

No	Uraian	Merk/Model/ Ukuran	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Service Telepon		Unit	75,000
2	Service Komputer, diluar Spare Part - CPU		Unit	150,000
	- Monitor		Unit	120,000

- Printer . . .

1	2	3	4	5
	- Printer		Unit	120,000
	- Chek All		Unit	450,000
3	Service / Perbaikan Filling 4 lad		Unit	120,000
4	Pengecatan Filling Kabinet		Unit	150,000

Catatan :

1. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang untuk semua jenis merk.
2. Satuan biaya pemeliharaan untuk jasa servis dan suku cadang yang tidak terse but dalam tabel di atas disesuaikan dengan harga yang berlaku.

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2013 M
10 RABIUL AKHIR 1434 H

STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. YANG TIDAK MENCAPAI 1/2 BULAN

No	Kedudukan dalam Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	Paket	1,219,531
2.	Wakil	Paket	871,094
3.	Sekretaris	Paket	696,875
4.	Wakil Sekretaris	Paket	609,766
5.	Anggota	Paket	479,102

2. YANG MENCAPAI 1/2 BULAN LEBIH

No	Kedudukan dalam Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	Paket	2,090,625
2.	Wakil	Paket	1,742,188
3.	Sekretaris	Paket	1,393,750
4.	Wakil Sekretaris	Paket	1,219,531
5.	Anggota	Paket	871,094

3. YANG MENCAPAI 1 BULAN LEBIH

No	Kedudukan dalam Pelatihan	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	Paket	3,484,375
2.	Wakil	Paket	2,613,281
3.	Sekretaris	Paket	2,090,625
4.	Wakil Sekretaris	Paket	1,755,500
5.	Anggota	Paket	1,219,531

KEGIATAN . . .

4. KEGIATAN YANG BERSIFAT INSIDENTIL/ TEMPORER

No	Kedudukan	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
1.	Penasehat	Paket	1,341,484
2.	Pengarah	Paket	1,149,844
3.	Penanggung jawab	Paket	1,054,023
4.	Ketua/ Koordinator	Paket	958,203
5.	Wakil Ketua	Paket	766,563
6.	Sekretaris	Paket	574,922
7.	Wakil Sekretaris	Paket	522,656
8.	Anggota	Paket	435,547
9.	Staf Sekretariat	Paket	383,281

5. HONORARIUM PARA PENGAJAR, FASILITATOR, INSTRUKTUR, NARA SUMBER PEMAKALAH PADA DIKLAT PENJENJANGAN, DIKLAT PRAJABATAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

A. Pengajar, Fasilitator, Instrukstur dan Narasumber/pemakalah untuk 45 menit

No	Jenis Pelatihan	Satuan	Harga (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelatihan penjenjangan	Jam	217,773
2.	Pelatihan Prajabatan	Jam	195,000
3.	Pelatihan teknis dan fungsional	Jam	195,000

B. Para Pengajar, Fasilitator, Instruktur, Nara sumber/pemakalah yang berdomisili dalam Kabupaten atau Provinsi Aceh

No	Kedudukan Pelatihan	Satuan	Harga (Rp.)
1	2	3	4
1.	Para Pengajar/ Fasilitator yang berdomisili dalam Provinsi Aceh diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	696,875
2.	Para Pengajar/ Fasilitatoryang berdomisili dalam kabupaten Pidie diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	304,883

C. Para . .

C. Para Peserta Diklat Diberi Bantuan dan Honorarium

No	PELATIHAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1.	Tidak disediakan penginapan 1x Perjalanan PP setiap Hari	PP	95,500
2.	Disediakan penginapan 1x perjalanan PP	PP	112,500
3.	Honorarium Peserta Diklat	PP	65,500
4.	Honorarium Peserta Bimtek1 s/d 5 Hari	OH	87,500
5.	Uang transpor Peserta Bimtek	OH	62,500

6. PANITIA KHUSUS YANG MENGATUR DIKLAT PELAKSANA KEGIATAN DILAPANGAN DILUAR KEPANITIAAN UMUM

No	Kedudukan dan Jenis Pelatihan	Satuan	Harga (Rp.)
1	2	3	4
1.	Direktur angkatan untuk Diklat PIM, setiap 1 jam pelajaran 45 Menit	Jam	38,125
2.	Piket malam/asrama perorang	Malam	75,000

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM